



▶ ANGKRINGAN PAKDE HARJO

Pekerja Berprestasi, Upah Harus Layak

Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pekan lalu menjadi tema yang menyedot perhatian pendengar setia Angkringan Pakde Harjo di Star Jogja FM. Berikut ulasan yang ditulis wartawan Harian Jogja, Andreas Tri Pamungkas.

Hidangan angkringan berupa gorengan dan minuman teh hangat tersaji di meja siar Star Jogja. Studio siaran berukuran sekitar 5x4 meter itu tak ubahnya sudah menjadi angkringan pinggir jalan. Rutin, setiap Senin pukul 19.00 WIB, program acara Angkringan Pakde Harjo itu mengudara pada saluran 101.3 FM. Anang, keponakan Pakde Harjo, menjadi host mengatur alur obrolan yang selalu berganti tiap minggunya.

Trajuningtyas dan Purwo Haryanto lebih dulu tiba di angkringan. Mereka adalah anggota Dewan Pengupahan Kota Jogja yang turut menyepakati usulan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Jogja. Malam itu, mereka bersama-sama Mas Popon, mahasiswa S2 sebuah perguruan tinggi di Jogja, mampir ke Angkringan Pakde Harjo Cabang Balaikota itu. Melepas penat setelah menggelar diskusi di Kampus

Mas Popon, mereka justru terlibat urusan perut para buruh. Anang mengeluhkan gajinya sebagai bakul angkringan di tempat Pakde Harjo selalu diberikan telat. Besarannya juga tak pasti. Mbak Miskun bernasib sama. Sebagai tukang laden bangunan, gajinya tak pernah naik sekalipun kaki mulusnya sampai berotot, karena memaksa ikut memikul batu berharap gajinya dapat ditambah oleh sang majikan.

Menyentil standar UMK yang harus diikuti oleh para pengusaha dalam memberikan gaji pada para pekerjanya, seorang bapak-bapak dengan menggunakan hem bewarna ungu tiba-tiba nyelonong duduk berdempetan dengan Mbak Miskun. Rambutnya lusuh. Helm yang baru saja dilepasnya agaknya membuat sisiran rambutnya jadi acak-acakan.

Perginya Pak RW karena mau bersiap-siap ronda malam membuat tempat duduk di angkringan lebih longgar. Tubuhnya yang sedikit gemuk jadi lebih leluasa. Rupanya, ia adalah Hadi Mochtar, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja.

"Hadi itu berarti petunjuk. Mochtar itu baik. Hadi Mochtar berarti petunjuk baik," begitu Hadi mengenalkan diri. Berbekal perhitungan UMK, Hadi membacakan UMK Kota Jogja yang sudah ditetapkan Gubernur adalah sebesar Rp1.173.300, naik dari sebelumnya Rp1.065.247. Seperti yang sudah diberitakan di *Harian Jogja*, UMK paling kecil Gunungkidul Rp 988.500. "Sebenarnya Gubernur ingin UMK seluruh kota kabupaten bisa di atas Rp1 juta," bisik Hadi sembari menyiapkan data-datanya.

Hadi mengatakan yang terpenting itu sekarang ini tak ada lagi pengertian bahwa buruh itu adalah mesin produksi. Namun antara pekerja dan pengusaha itu adalah partner. Pekerja harus berprestasi sementara pengusaha juga harus memberikan gaji yang layak. "Bisa sama-sama maju," katanya.

Tina, Tumini, dan pendengar lainnya ikut nimbrung melalui layanan *hotline Star Jogja FM*. Tina mempertanyakan tidak bolehnya kontrak diperbarui setelah dijeda dua bulan. Sedangkan Tumini mempersoalkan bisa tidaknya seorang pembantu meminta gaji sesuai UMK. "Kalau sesuai peraturannya malah 30 hari. Artinya jeda dua bulan sudah melebihi jeda. Normatifnya bisa," ujar Tyas, yang mengurus bidang SDM di Rumah Sakit Ludiro Husodo itu.

Namun menurut Purwo itu hanya cara pengusaha untuk trik dari pengusaha agar tidak mengangkat karyawan tetap, karena menambah ongkos kesejahteraan karyawan. Sedangkan terkait pertanyaan Tumini, Hadi menghalalkan permintaan itu sekalipun seorang pembantu. Akan tetapi, tambahan-tambahan fasilitas yang diberikan oleh majikan berupa makan di rumah dan tempat tidur tidak semestinya diabaikan. (andre@harianjogja.com)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 23 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005